

## Pembatalan akta jual beli atas harta bersama (putusan MARI No. 334 PK/Pdt/2003) / Danuta Putri

Danuta Putri, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269741&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

#### <b>ABSTRAK</b><br>

Dalam masyarakat hukum yang berkembang dari waktu ke waktu, perlu adanya suatu kepastian tentang perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Akta jual beli dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT. Penulisan tesis ini membahas suatu kasus pembatalan akta jual beli atas harta bersama berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.334 PK/Pdt/2003. Dalam kasus ini telah dilaksanakan jual beli atas harta bersama yang dilakukan tanpa persetujuan dari istri/pasangan hidupnya. Hal tersebut mengakibatkan jual beli yang dinyatakan dalam akta No.320/09.03/JG.II/1996 tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu suatu sebab yang halal dan mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum bagi Notaris selaku PPAT yang membuat akta tidak sesuai dengan Undang-Undang dan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 334 PK/Pdt/2003. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Notaris/PPAT yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta dapat dikenakan sanksi ganti rugi dan dapat dituntut ke muka pengadilan. Jual beli atas harta bersama tanpa persetujuan dari pasangan hidup adalah tidak sah dan batal demi hukum.

<hr>

#### <b>ABSTRACT</b><br>

In the legal community that is developed from time to time, it is necessary to have the certainty about the agreement made by the parties. The notary is the general official having the authority to prepare the authentic deed on all acts, agreements and stipulation that are required by the general regulation or by the interested party intended to be declared in an authentic deed. The deed of sale and purchase is prepared by Notary in his capacity as the Conveyancer. This thesis is prepared to discuss a case of cancellation of deed of sale and purchase on the joint assets based on the judgement of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 334 PK/Pdt/2003. In this case, a sale and purchase have been conducted on the joint assets without the approval from the wife/spouse. It caused the sale and purchase stated in deed No. 320/09.03/JG.II/1996 invalid and become null and void because it

did not fulfill one of the requirements of the valid agreement in article 1320 of Civil Code namely a valid reason containing the unlawful act. The subject matter in this thesis legal consequence for the Notary/Conveyancer preparing the deed not in accordance with the law and legal consideration of judgment of Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 334 PK/Pdt/2003. The research methodology used is the juridical normative. The Notary/Conveyancer that to the colhcion in the preparing authentic deed can owing a fine doubt and can to lay before the court Sale and purchase on the joint assets without the approval from the spouse is invalid and become null.